



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Januari 2023/Periodik - 2022)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
UNIT KERJA : DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANIE GIAT SETYAWAN
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 852890

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 880.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 175 m2/36 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
2. Tanah Seluas 102 m2 di KAB / KOTA KEBUMEN, HASIL SENDIRI Rp. 76.500.000
3. Tanah Seluas 136 m2 di KAB / KOTA WONOSOBO, WARISAN Rp. 554.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 59.900.000**

1. MOTOR, HONDA BEBEK MATIC BEAT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA BEBEK MATIC VARIO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000
3. MOTOR, HONDA MEGA PRO / CUSTOM Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000
4. MOTOR, YAMAHA BEBEK MATIC AEROX Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000
5. LAINNYA, UNITED CLOVIS Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000
6. LAINNYA, POLYGON MONARCH 5 Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 750.000
7. LAINNYA, POLYGON - Tahun 1993, HASIL SENDIRI Rp. 150.000
8. LAINNYA, - SEPEDA ONTA Tahun 1940, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000



C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. ----

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 123.212.221

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 1.063.612.221

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.063.612.221

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.